

# Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

*(Influence Human Development Index (HDI) and Total Population against District/City Governments's Capital Expenditure in East Java Province)*

Aditya Putra Widiagma  
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: adityaputrawidiagma@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2011-2013 dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2012 hingga 2014. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menyebabkan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk pada suatu daerah, maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk.

## Abstract

*This research aims to determine the effect of the Human Development Index and Total Population against Capital Expenditure on district / municipal governments in the province of East Java. This research used secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics in 2011-2013 and the Directorate General of Fiscal Balance in 2012 to 2014. Methods of data analysis using Descriptive Statistics, Classical Assumption Test and Hypothesis Test consisted of Regression Methods, Coefficient of Determination, F test, as well as the t test. The results showed that the Human Development Index and Total Population have positive influence on Capital Expenditure, this causes the higher amount of population in an area, then the capital expenditures in the region are becoming increasingly high.*

**Keywords:** Capital Expenditures, Index of Human Development, Total Population

## Pendahuluan

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi daerah yang merupakan hak dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya dalam kegiatan pemerintahan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik.

Peningkatan pelayanan pada sektor publik dapat meningkatkan minat para investor untuk menanamkan

investasinya di daerah. Maka dari itu, perubahan komposisi belanja merupakan upaya logis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Maharani dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012). Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012), dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pada saat ini, banyak penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintahan daerah, namun hanya fokus dari segi keuangannya saja seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut peneliti, faktor-faktor tersebut tentu mempengaruhi besarnya belanja modal pemerintah daerah karena pada dasarnya pendapatan akan digunakan untuk belanja dan pembiayaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap besarnya belanja modal

yang dikeluarkan pemerintah daerah dari segi eksternal atau non keuangan yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Penduduk diartikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur-infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anggaran belanja modal pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Penelitian ini memilih Provinsi Jawa Timur dikarenakan lokasi ini merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Sebagai daerah dengan penduduk yang banyak tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan keajahteraan masyarakatnya. Selain itu tempat penelitian ini memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik, yaitu sebesar 66,65%.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, serta dapat memberikan wawasan dan pandangan yang lebih luas terhadap belanja modal pemerintah daerah.

## Metode Penelitian

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013, yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Jawa Timur, dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, data Belanja Modal diperoleh dengan cara menelusuri data APBD tahun 2012-2014 dari

website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka dan bersifat objektif.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dimana Provinsi Jawa Timur terdapat 38 pemerintahan daerah yang terdiri dari 29 pemerintahan kabupaten dan 9 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 38 kabupaten/kota akan diamati selama 3 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 114 pengamatan.

### Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ([jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id)) dan menelusuri Laporan Realisasi APBD dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Autokorelasi), dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F, serta Uji t.

## Hasil Penelitian

### Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dimana Provinsi Jawa Timur terdapat 38 pemerintahan daerah yang terdiri dari 29 pemerintahan kabupaten dan 9 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 38 kabupaten/kota akan diamati selama 3 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 114 pengamatan.

Dari 114 pengamatan tersebut, terdapat adanya data outlier. Menurut Ghozali (2011:36), outlier adalah kasus atau data yang muncul dalam bentuk ekstrim. Setelah dilakukan pendeteksian data outlier, terdapat 3 data outlier sehingga kini jumlah data pada penelitian ini menjadi 111 data dan 37 pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berikut adalah rincian data yang dibuang karena terdeteksi outlier.

**Tabel 1.** Rincian Data Outlier

Kab./Kota	2011	2012	2013	Jumlah
Banyuwangi	√	√	√	3
<b>Jumlah</b>				<b>3</b>

### Statistik Deskriptif

Tujuan analisis ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Variabel yang digunakan adalah Belanja Modal (Y), Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Jumlah Penduduk (X2). Statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dirincikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Y	111	57.776	2.000.778	304.012,82	265.237,948
X1	111	60,78	78,97	71,8715	4,55410
X2	111	120.873	2.821.929	999.390,61	628.951,297
Valid N (listwise)	111				

Sumber: Output SPSS 20, 2015

### Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan Uji Asumsi klasik yakni Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi, disimpulkan bahwa tidak ada masalah asumsi klasik pada penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis

Dari hasil Uji F, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 88,288 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  sebesar 3,08 ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) dan angka Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 (Sig. < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk adalah model yang fit (layak).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,613 atau 61,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 61,3% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk, sedangkan sisanya yaitu 38,7% (100% - 61,3%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar persamaan.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melalui uji asumsi klasik, maka model regresi layak

sebagai alat untuk mendeteksi hubungan antar variabel independen yang diajukan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Jumlah Penduduk (X2) dengan variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y). rekapitulasi hasil Analisis Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-stat	Sig.
(Constant)	2,386	0,471	0,639
X <sub>1</sub>	0,134	2,148	0,034
X <sub>2</sub>	0,818	13,139	0,000

Sumber: Output SPSS 20, 2015

Berdasarkan tabel 3, diperoleh persamaan hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,386 + 0,134 X_1 + 0,818 X_2$$

### Uji t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah masing-masing variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel terikat (dependent variable). Secara umum, ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan Uji T dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji t

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
X1	0,034	Berpengaruh
X2	0,000	Berpengaruh

Sumber: Output SPSS 20, 2015

### Pembahasan

#### Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,134 dan nilai signifikansi sebesar 0,034 yang berada di bawah 0,05 ( $0,034 < 0,05$ ) sehingga sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Dengan diterimanya hipotesis pertama, maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Andaiyani (2012) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal, ini berarti bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Indeks Pembangunan

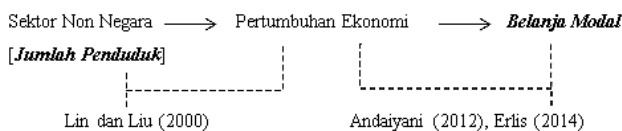
Manusia (IPM) yang tinggi berarti daerah tersebut sebenarnya telah tergolong daerah yang sudah maju. Daerah maju dengan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang baik memicu peningkatan pendapatan daerah. Dengan bertambahnya pendapatan pada daerah tersebut, pemerintah dapat menganggarkan belanja modalnya lebih banyak.

Sebagai pihak agen yang bertanggungjawab kepada masyarakat, kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah harus dilaksanakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan daerah. Di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah sehingga mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam menggunakan Belanja Modalnya.

### Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Variabel Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,818 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.

Dengan diterimanya hipotesis kedua, maka hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Lin dan Liu (2000) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa Jumlah Penduduk (Total Population (TPOP) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta Andaiyani (2012) dan Erlis (2014) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan berikut.



Teori Keagenan (Agency Theory) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak prinsipal yang memberikan tugas legislatif (DPRD) untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi eksekutif (Pemerintah Daerah) yang menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan atau pelayanan publik. Pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Semakin banyak masyarakat pada suatu daerah, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin dipenuhi. Maka dari itu, pihak legislatif dan eksekutif membuat kebijakan yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, informasi mengenai jumlah penduduk sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur-

infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah mempertimbangkan Jumlah Penduduk di daerahnya dalam mengambil keputusan untuk penggunaan Belanja Modalnya

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa data kependudukan merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir yaitu evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Beberapa masalah kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Istiyani (2013: 5) juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang penduduk penting untuk lembaga-lembaga pemerintah. Perencanaan-perencanaan daerah akan menjadi lebih tepat apabila kesemuanya didasarkan pada data kependudukan. Oleh sebab itu, dalam penggunaan Belanja Modal pemerintah daerah dalam rangka membangun pelayanan publik, informasi tentang Jumlah Penduduk sangatlah penting.

## Kesimpulan dan Keterbatasan

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan arah hubungan yang bersifat positif, yang bermakna jika Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk suatu daerah tinggi maka jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan menjadi tinggi.

### Keterbatasan

Peneliti hanya menggunakan data pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini mengakibatkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Maka dari itu, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan lebih dari satu provinsi pada penelitian selanjutnya, agar dapat membandingkan provinsi satu dengan provinsi lainnya dan hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Modal, hal ini didasarkan bahwa sebesar 63,1% variabel pada penelitian ini berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga masih ada 38,7% variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Daftar Pustaka

- Andaiyani. 2012. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Tesis. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004-2013. <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/235> [13 April 2015]

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2015. Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1> [13 April 2015]

Erlis, Nola. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera). Skripsi. Padang: Universitas Bung Hatta.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Istiyani, Nanik. 2013. Buku Ajar Ekonomi Kependudukan. Jember: Pustaka Radja.

Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

